

Utang Pemerintah dan Keadilan Antargenerasi

Perspektif Fiskal, Etika Publik, dan Pembangunan Indonesia

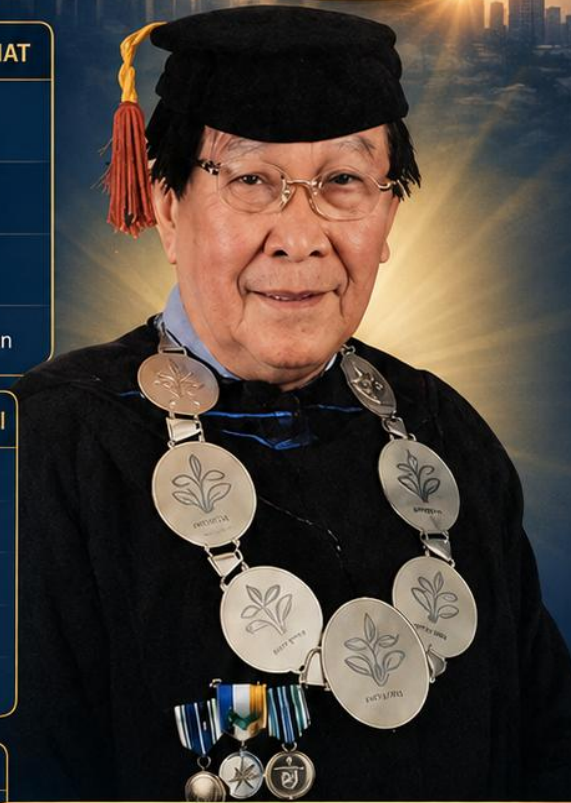
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Artikel Akademik | Agustus 2026

UTANG PEMERINTAH DAN KEADILAN ANTARGENERASI

Menimbang keberlanjutan fiskal, tanggung jawab moral, dan masa depan generasi berikutnya



- 1. PERTANYAAN UTAMA**
 - Siapa menikmati manfaat hari ini?
 - Siapa menanggung biaya di masa depan?
 - Apakah utang dipakai untuk hal produktif?
- 2. MANFAAT UTANG YANG SEHAT**
 - Infrastruktur produktif
 - Pendidikan & SDM
 - Kesehatan publik
 - Transisi energi & ketahanan
- 3. RISIKO BAGI GENERASI MENDATANG**
 - Beban bunga
 - Pajak lebih berat
 - Ruang fiskal menyempit
 - Ketimpangan antargenerasi
- 4. PRINSIP KEADILAN ANTARGENERASI**
 - Produktivitas
 - Transparansi
 - Keberlanjutan
 - Akuntabilitas
 - Pemerataan manfaat
- 5. ARAH KEBIJAKAN**

Utang harus dikelola hati-hati, diarahkan pada investasi jangka panjang, dan dijaga agar tidak membebani generasi mendatang secara tidak adil.

Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycct.com/cv.pdf



KEBIJAKAN
BERBASIS BUKTI



FISKAL SEHAT
NEGARA KUAT



TANGGUNG JAWAB
KITA, MASA DEPAN
MEREKA



HARI INI BIJAK,
BESOK BERKELANJUTAN



INVESTASI UNTUK
INDONESIA MAJU

Abstrak

Artikel ini menganalisis utang pemerintah Indonesia melalui perspektif keadilan antargenerasi. Utang dipahami bukan semata-mata sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang memindahkan sumber daya, manfaat, risiko, dan ruang kebijakan antara generasi sekarang dan generasi mendatang. Analisis membedakan utang produktif yang membentuk aset, modal manusia, kapasitas teknologi, dan ketahanan ekologis dari utang yang membiayai konsumsi jangka pendek atau proyek dengan manfaat sosial rendah. Artikel juga membahas rasio utang, biaya bunga, risiko nilai tukar, kewajiban kontinjensi, politik anggaran, demografi, desentralisasi, serta hubungan antara utang dan reformasi pajak. Data resmi hingga Semester I 2026 menunjukkan posisi APBN masih terkendali, tetapi keberlanjutan tidak dapat disimpulkan hanya dari rasio utang terhadap PDB. Kualitas belanja, basis penerimaan, struktur jatuh tempo, kredibilitas institusi, dan kapasitas generasi penerus untuk membayar merupakan unsur yang sama pentingnya. Artikel mengusulkan kerangka kebijakan yang menghubungkan setiap pembiayaan dengan manfaat lintas generasi, biaya siklus hidup, pengelolaan aset, transparansi risiko, dan evaluasi hasil. Kesimpulannya, utang dapat sejalan dengan keadilan antargenerasi apabila menghasilkan warisan kapasitas yang lebih besar daripada warisan kewajiban, serta dikelola melalui disiplin fiskal yang demokratis, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Kata Kunci: *Utang pemerintah; keadilan antargenerasi; keberlanjutan fiskal; APBN; ruang fiskal; investasi publik; risiko fiskal; generasi masa depan.*

Catatan Kontekstual Data

Pembahasan menggunakan konteks data resmi terkini yang tersedia pada saat penulisan. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun, belanja negara Rp1.656,0 triliun, defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB, dan keseimbangan primer masih surplus Rp85,1 triliun. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar AS. Angka tersebut tidak identik dengan total utang pemerintah karena hanya mencakup komponen eksternal. Data ini digunakan sebagai konteks analitis, bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh risiko fiskal dapat diringkas dalam satu angka.

Kerangka Analisis

Artikel ini memakai tiga lensa. Pertama, lensa keberlanjutan fiskal, yakni kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban tanpa koreksi ekstrem pada pajak, belanja, inflasi, atau aset publik. Kedua,

lensa produktivitas sosial, yakni kemampuan pembiayaan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang bertahan. Ketiga, lensa keadilan, yakni bagaimana manfaat dan biaya dibagi di antara kelompok pendapatan, wilayah, serta generasi yang berbeda.

Pendekatan tersebut penting karena utang yang secara teknis masih dapat dibayar belum tentu adil. Pemerintah dapat saja mempertahankan pembayaran melalui pengurangan layanan publik, kenaikan pajak regresif, atau eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, peningkatan utang dalam masa krisis dapat adil apabila mencegah kehancuran kapasitas produktif, melindungi anak-anak dari kehilangan pendidikan, dan menjaga sistem kesehatan. Dengan demikian, keberlanjutan dan keadilan perlu dianalisis bersama.

Keadilan antargenerasi dalam artikel ini tidak dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan semua kondisi tetap sama. Setiap generasi menghadapi teknologi, risiko, dan kebutuhan yang berbeda. Yang perlu dijaga adalah kemampuan generasi penerus untuk memilih jalan hidup dan kebijakan mereka sendiri. Utang menjadi tidak adil ketika ia mengunci sebagian besar pendapatan masa depan tanpa meninggalkan aset, pengetahuan, institusi, atau lingkungan yang memperluas pilihan tersebut.

1. Pendahuluan: Utang sebagai Kontrak Lintas Waktu

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Utang pemerintah pada hakikatnya merupakan pemindahan sumber daya dari masa depan ke masa kini melalui janji pembayaran yang mengikat penerimaan negara pada tahun-tahun berikutnya. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 1 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Perdebatan publik sering terjebak pada dikotomi sederhana antara utang yang dianggap selalu buruk dan utang yang dianggap otomatis aman selama rasio tertentu belum terlampaui. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang

dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 1 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Keadilan antargenerasi mengharuskan setiap keputusan pembiayaan mempertimbangkan hak generasi sekarang sekaligus kebebasan fiskal generasi penerus. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 1 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, transisi energi, dan adaptasi perubahan iklim. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 1 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Artikel ini menempatkan utang sebagai instrumen kebijakan yang legitim apabila digunakan secara produktif, transparan, berhati-hati, dan didukung institusi yang kuat. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan

pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 1 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa pendahuluan: utang sebagai kontrak lintas waktu harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

2. Konsep Keadilan Antargenerasi

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Keadilan antargenerasi membahas pembagian manfaat, biaya, kesempatan, risiko, dan kapasitas ekologis di antara kelompok manusia yang hidup pada waktu berbeda. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 2 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Generasi masa depan tidak hadir dalam pemilu, tidak memiliki kursi di parlemen, dan tidak dapat menolak kewajiban yang diputuskan oleh generasi sekarang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan

ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 2 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Prinsip keadilan tidak selalu berarti larangan mewariskan utang, melainkan kesepadanan antara beban yang diwariskan dan aset atau kapasitas yang diterima. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 2 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Ada dimensi prosedural karena keputusan berutang harus dihasilkan melalui proses yang terbuka, dapat diaudit, dan memberi ruang bagi pengetahuan jangka panjang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 2 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Ada pula dimensi substantif, yakni apakah kebijakan memperluas kebebasan nyata generasi berikutnya atau justru mempersempit pilihan mereka.

Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 2 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan antargenerasi harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

3. Mengapa Pemerintah Berutang

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Pemerintah berutang untuk menutup kesenjangan antara penerimaan dan belanja, mengelola siklus ekonomi, membiayai investasi, serta merespons krisis dan bencana. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 3 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Dalam kondisi resesi atau guncangan besar, pembiayaan defisit dapat mencegah kontraksi yang lebih dalam dan melindungi kapasitas produksi masyarakat. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh

tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 3 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Utang juga memungkinkan proyek berumur panjang dibayar secara bertahap oleh generasi yang sama-sama menikmati manfaatnya. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 3 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Namun alasan pembiayaan perlu dibedakan antara kebutuhan sementara, investasi strategis, kewajiban darurat, dan ekspansi belanja yang bersifat permanen. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 3 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Tanpa disiplin tujuan, utang dapat menjadi jalan mudah untuk menghindari reformasi pajak, penajaman prioritas, dan pengendalian belanja berkualitas rendah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 3 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa mengapa pemerintah berutang harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

4. Membaca Posisi Utang Indonesia secara Proporsional

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Posisi fiskal Indonesia harus dibaca melalui kombinasi rasio utang, pembayaran bunga, keseimbangan primer, kedalaman pasar keuangan, dan basis penerimaan negara. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 4 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Data Semester I 2026 menunjukkan APBN mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB, disertai surplus keseimbangan primer Rp85,1 triliun.

Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 4 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Utang luar negeri pemerintah pada Mei 2026 tercatat sekitar 217,3 miliar dolar AS dan masih didominasi struktur berjangka panjang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 4 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Rasio yang relatif moderat tidak menghapus risiko karena kapasitas fiskal juga ditentukan oleh rasio pajak, kualitas belanja, biaya dana, dan volatilitas pasar. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 4 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai

sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Kesehatan utang harus dinilai secara dinamis, bukan hanya melalui posisi pada satu tanggal, sebab perubahan suku bunga dan nilai tukar dapat mengubah beban secara cepat. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 4 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa membaca posisi utang Indonesia secara proporsional harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

5. Rasio Utang Bukan Satu-satunya Ukuran

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Rasio utang terhadap PDB berguna untuk perbandingan, tetapi dapat menyembunyikan perbedaan besar dalam struktur ekonomi dan kemampuan pemungutan pajak. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 5 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Dua negara dengan rasio yang sama dapat menghadapi risiko berbeda apabila satu negara memiliki pasar obligasi domestik dalam dan negara lain bergantung pada valuta asing. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 5 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Biaya bunga terhadap pendapatan negara sering lebih dekat dengan tekanan anggaran aktual daripada rasio utang terhadap PDB. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 5 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Maturitas, komposisi mata uang, profil pemegang surat utang, dan konsentrasi jatuh tempo menentukan kerentanan pembiayaan kembali. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 5 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi.

Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Penilaian antargenerasi perlu menambahkan kualitas aset publik, kewajiban kontinjensi, kondisi lingkungan, dan kapasitas manusia yang terbentuk dari belanja utang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 5 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa rasio utang bukan satu-satunya ukuran harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

6. Golden Rule dan Prinsip Pembiayaan Investasi

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Golden rule fiskal menyatakan bahwa utang lebih dapat dibenarkan untuk investasi daripada untuk membiayai konsumsi rutin pemerintah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 6 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai

sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Penerapan prinsip tersebut memerlukan definisi investasi yang ketat agar belanja biasa tidak sekadar diberi label pembangunan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 6 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Investasi publik harus dinilai berdasarkan manfaat sosial bersih, ketahanan aset, biaya pemeliharaan, dan kontribusinya pada produktivitas. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 6 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Proyek yang menghasilkan manfaat lintas generasi dapat dibiayai dengan maturitas yang selaras dengan umur ekonominya. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 6

menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Golden rule tidak berarti semua infrastruktur layak dibiayai utang, sebab proyek prestise dengan permintaan rendah tetap dapat menjadi warisan beban. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 6 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa golden rule dan prinsip pembiayaan investasi harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

7. Pendidikan, Kesehatan, dan Modal Manusia

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Belanja pendidikan dan kesehatan memiliki karakter investasi meskipun secara akuntansi sering dicatat sebagai belanja berjalan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 7 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat,

siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Pembiayaan pendidikan yang meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, sains, kesehatan, dan adaptasi digital menciptakan basis pajak masa depan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 7 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Kualitas belanja lebih penting daripada besarnya alokasi karena fasilitas tanpa guru berkualitas atau layanan kesehatan tanpa tenaga memadai tidak menghasilkan manfaat optimal. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 7 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Utang untuk modal manusia perlu dilindungi oleh indikator hasil, evaluasi longitudinal, dan tata kelola pengadaan yang transparan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya,

utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 7 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Keadilan antargenerasi menuntut agar generasi muda tidak hanya mewarisi kewajiban finansial, tetapi juga kompetensi untuk hidup produktif dan bermartabat. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 7 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan modal manusia harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

8. Infrastruktur Produktif dan Risiko Proyek Putih

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Infrastruktur dapat memperkuat konektivitas, mengurangi biaya logistik, membuka pasar, dan meningkatkan produktivitas wilayah tertinggal. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara.

Karena itu, isu dalam bagian 8 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Namun proyek yang dipilih karena pertimbangan politik jangka pendek dapat berubah menjadi aset berbiaya tinggi dengan utilisasi rendah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 8 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Analisis biaya-manfaat perlu memasukkan dampak distribusi, risiko iklim, biaya operasi, pembebasan lahan, dan ketergantungan teknologi. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 8 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat berbagi risiko tetapi juga menciptakan kewajiban kontinjensi yang kurang terlihat dalam anggaran. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang

yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 8 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Generasi mendatang akan menanggung biaya pemeliharaan, sehingga keputusan investasi harus memastikan tersedianya pendanaan siklus hidup aset. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 8 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa infrastruktur produktif dan risiko proyek putih harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

9. Utang, Perubahan Iklim, dan Ekologi

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Perubahan iklim menciptakan kewajiban fiskal antargenerasi melalui bencana, kerusakan infrastruktur, gangguan pangan, dan biaya kesehatan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar

kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 9 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Menghindari investasi adaptasi hari ini dapat menghasilkan utang implisit yang lebih besar berupa kerugian dan kebutuhan rehabilitasi di masa depan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 9 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Pembiayaan hijau dapat mendukung energi bersih, perlindungan pesisir, restorasi ekosistem, transportasi rendah karbon, dan ketahanan air. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 9 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Label hijau harus disertai taksonomi, pengukuran dampak, verifikasi independen, dan pencegahan greenwashing. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai

perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 9 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Keadilan antargenerasi juga mensyaratkan agar pembayaran utang tidak mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 9 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa utang, perubahan iklim, dan ekologi harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

10. Beban Bunga dan Penyempitan Ruang Fiskal

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Beban bunga merupakan pengalihan sumber daya dari program publik menuju pembayaran atas pembiayaan masa lalu. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai

aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 10 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Ketika pendapatan negara tumbuh lebih lambat daripada kewajiban bunga, ruang bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan investasi menyempit. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 10 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Suku bunga global yang tinggi meningkatkan biaya penerbitan baru dan pembiayaan kembali surat utang yang jatuh tempo. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 10 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Strategi pengelolaan utang perlu mengurangi konsentrasi jatuh tempo, menjaga likuiditas, dan memperluas basis investor domestik. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 10 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Keadilan menuntut agar generasi mendatang tidak terjebak membayar bunga tinggi akibat keputusan pembiayaan yang mengabaikan risiko pasar. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 10 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa beban bunga dan penyempitan ruang fiskal harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

11. Risiko Nilai Tukar dan Utang Luar Negeri

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Utang valuta asing menciptakan ketidaksesuaian apabila penerimaan pemerintah terutama berdenominasi rupiah. Persoalan ini tidak dapat dinilai

hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 11 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan nilai rupiah dari pokok dan bunga meskipun jumlah valuta asing tidak berubah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 11 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Utang luar negeri dapat memberikan tenor panjang dan sumber pembiayaan proyek, tetapi harus dipadankan dengan kapasitas pembayaran dan manajemen risiko. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 11 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai

sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Dominasi utang jangka panjang mengurangi risiko likuiditas jangka pendek tetapi tidak menghapus risiko kurs dan sentimen investor. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 11 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Pendalaman pasar keuangan domestik merupakan strategi antargenerasi karena mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang bergejolak. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 11 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa risiko nilai tukar dan utang luar negeri harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

12. Kewajiban Kontinjensi dan Utang Tersembunyi

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Jaminan pemerintah, badan usaha milik negara, proyek kemitraan, pensiun, dan risiko bencana dapat berubah menjadi kewajiban nyata ketika kondisi memburuk. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 12 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Utang antargenerasi tidak hanya tercatat dalam neraca pemerintah, tetapi juga berada dalam janji dan risiko yang belum dibayar saat ini. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 12 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, BUMN yang menjalankan penugasan publik memerlukan kompensasi transparan agar kerugian tidak menumpuk sebagai kewajiban terselubung. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 12 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi

distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Pencatatan dan uji ketahanan kewajiban kontinjensi penting untuk mencegah kejutan fiskal yang dialihkan kepada pembayar pajak masa depan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 12 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Pengungkapan fiskal yang komprehensif harus menjelaskan skenario risiko, probabilitas, dan potensi dampaknya terhadap APBN. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 12 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa kewajiban kontinjensi dan utang tersembunyi harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi.

Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

13. Desentralisasi, Daerah, dan Keadilan Wilayah

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Utang pemerintah juga memiliki dimensi kewilayahan karena manfaat proyek dan sumber pembayaran tersebar tidak merata antarwilayah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 13 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Daerah penghasil sumber daya dapat menanggung kerusakan ekologis sementara manfaat fiskal terkonsentrasi di pusat atau kawasan lain. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 13 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Pembiayaan infrastruktur daerah perlu memperhatikan kapasitas fiskal, kualitas institusi, dan kemampuan pemeliharaan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya,

utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 13 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Transfer antarpemerintah dapat mengurangi ketimpangan, tetapi desain yang lemah dapat menurunkan insentif peningkatan pendapatan asli daerah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 13 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Keadilan antargenerasi harus dipadukan dengan keadilan antardaerah agar generasi muda di wilayah terpencil memperoleh kesempatan yang setara. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 13 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa desentralisasi, daerah, dan keadilan wilayah harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta

keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

14. Demografi, Penuaan, dan Basis Pajak Masa Depan

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Perubahan struktur umur penduduk akan memengaruhi penerimaan pajak, belanja kesehatan, pensiun, dan kebutuhan perawatan jangka panjang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 14 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Bonus demografi hanya memperkuat kapasitas pembayaran utang apabila penduduk usia kerja memiliki pekerjaan produktif dan kompetensi yang sesuai. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 14 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Penuaan penduduk dapat meningkatkan belanja wajib pada saat proporsi pembayar pajak relatif menurun. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif,

kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 14 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Utang yang membiayai penciptaan kerja berkualitas dan produktivitas akan lebih adil daripada utang yang tidak memperkuat basis ekonomi masa depan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 14 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Perencanaan fiskal perlu menggunakan proyeksi demografi sebagai bagian dari analisis keberlanjutan jangka panjang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 14 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa demografi, penuaan, dan basis pajak masa depan harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

15. Krisis, Pandemi, dan Prinsip Pengecualian

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Krisis besar dapat membenarkan peningkatan utang karena biaya tidak bertindak sering jauh lebih besar daripada biaya pembiayaan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 15 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Dukungan fiskal pada masa krisis harus cepat, terarah, sementara, dan dapat dievaluasi setelah kondisi darurat berakhir. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 15 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Klausul pengecualian fiskal diperlukan agar aturan tidak bersifat pro-siklis, tetapi klausul tersebut harus memiliki kriteria dan batas waktu yang jelas. Persoalan ini tidak

dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 15 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Setelah krisis, konsolidasi perlu dilakukan bertahap agar tidak mematikan pemulihan atau membebani kelompok rentan secara tidak proporsional. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 15 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Pelajaran krisis harus diterjemahkan menjadi cadangan fiskal, sistem perlindungan sosial adaptif, dan kapasitas respons yang lebih kuat. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 15 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang

terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa krisis, pandemi, dan prinsip pengecualian harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

16. Politik Anggaran dan Bias Jangka Pendek

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Siklus politik cenderung memberi insentif pada program yang manfaatnya terlihat segera sementara biayanya muncul setelah masa jabatan berakhir. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 16 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Generasi masa depan menjadi kelompok yang mudah dibebani karena tidak memiliki suara langsung dalam proses elektoral hari ini. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 16 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Earmarking, belanja wajib, dan proyek populer dapat mempersempit kemampuan pemerintah berikutnya menentukan prioritas. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 16 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Lembaga fiskal independen, laporan risiko jangka panjang, dan evaluasi parlemen dapat mengurangi bias jangka pendek. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 16 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Budaya politik fiskal perlu bergeser dari kebanggaan pada besarnya anggaran menuju akuntabilitas atas hasil dan keberlanjutan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 16 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi.

Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa politik anggaran dan bias jangka pendek harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

17. Pajak, Kontrak Sosial, dan Pembayaran Utang

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Utang hari ini pada akhirnya dibayar melalui pajak, pengurangan belanja, inflasi, penjualan aset, atau pertumbuhan ekonomi yang memperbesar basis penerimaan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 17 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Sistem pajak yang sempit dan tidak adil meningkatkan kemungkinan beban pembayaran dialihkan kepada konsumsi atau kelompok yang mudah dipungut. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 17 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai

sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Reformasi pajak harus meningkatkan kepatuhan, mengurangi penghindaran, memperluas basis, dan melindungi kelompok berpendapatan rendah. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 17 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Penerimaan dari sumber daya alam perlu diubah menjadi aset manusia dan dana antargenerasi, bukan dihabiskan seluruhnya untuk konsumsi saat ini. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 17 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Legitimasi utang bergantung pada kepercayaan bahwa penerimaan dan pembayarannya dikelola secara adil, efisien, dan bebas korupsi. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu

dalam bagian 17 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa pajak, kontrak sosial, dan pembayaran utang harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

18. Kerangka Kebijakan Utang yang Berkeadilan

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Indonesia memerlukan kerangka yang menghubungkan strategi utang jangka menengah dengan tujuan pembangunan, risiko fiskal, dan indikator keadilan antargenerasi. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 18 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Setiap pembiayaan besar perlu disertai pernyataan manfaat lintas generasi, biaya siklus hidup, dan skenario pembayaran. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 18 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang

menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Pelaporan harus membedakan utang untuk investasi produktif, penanganan krisis, refinancing, dan pembiayaan belanja rutin. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 18 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Pemerintah perlu memperkuat manajemen aset agar publik dapat melihat apa yang diperoleh dari setiap tambahan kewajiban. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 18 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Aturan fiskal harus cukup tegas untuk menjaga disiplin dan cukup fleksibel untuk merespons krisis serta investasi strategis. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut.

Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 18 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan utang yang berkeadilan harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

19. Agenda Reformasi Kelembagaan

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menilai risiko jangka panjang diperlukan agar pengawasan tidak berhenti pada kepatuhan tahunan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 19 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Audit kinerja harus menilai manfaat ekonomi dan sosial proyek yang dibiayai utang, bukan hanya ketepatan administrasi. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 19

menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Sistem informasi publik perlu memungkinkan penelusuran dari penerbitan utang menuju program, proyek, output, hasil, dan aset. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 19 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Lembaga fiskal independen dapat menyajikan proyeksi nonpartisan, menguji asumsi pemerintah, dan memperkuat literasi publik. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 19 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Partisipasi akademisi, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan generasi muda penting untuk memperluas perspektif dalam keputusan fiskal. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang

diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 19 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa agenda reformasi kelembagaan harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

20. Prioritas Strategis bagi Indonesia

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Prioritas pertama adalah memperkuat penerimaan negara agar kebutuhan pembangunan tidak terlalu bergantung pada penambahan utang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 20 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Prioritas kedua adalah mengalihkan belanja menuju modal manusia, infrastruktur produktif, riset, transformasi digital, dan ketahanan iklim. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut.

Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 20 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Prioritas ketiga adalah menghentikan proyek berbiaya tinggi dengan manfaat sosial rendah serta memperbaiki evaluasi sebelum proyek dimulai. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 20 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Prioritas keempat adalah mengendalikan kewajiban kontinjensi BUMN dan kemitraan publik-swasta melalui pengungkapan dan batas risiko. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 20 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Prioritas kelima adalah membangun narasi publik bahwa disiplin fiskal bukan penghematan membabi buta, melainkan perlindungan terhadap pilihan generasi mendatang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio

utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 20 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa prioritas strategis bagi Indonesia harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

21. Skenario Indonesia 2045

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Dalam skenario produktif, utang hari ini membentuk tenaga kerja unggul, infrastruktur tangguh, ekonomi rendah karbon, dan basis pajak yang lebih luas. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 21 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Dalam skenario stagnasi, pertumbuhan penerimaan tertinggal, biaya bunga meningkat, dan ruang fiskal makin terikat pada kewajiban masa lalu. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang

yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 21 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Dalam skenario krisis, guncangan iklim, geopolitik, atau keuangan memaksa pemerintah berutang pada biaya tinggi ketika bantalan fiskal sudah tipis. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 21 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Perbedaan antarskenario terutama ditentukan oleh kualitas institusi, konsistensi reformasi, produktivitas investasi, dan kemampuan mengelola risiko. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 21 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan neraca publik yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga kuat secara sosial, ekologis, dan pengetahuan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 21 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa skenario Indonesia 2045 harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

22. Penutup

Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, Utang pemerintah bukan dosa ekonomi dan bukan pula sumber daya gratis; ia adalah instrumen yang selalu membawa konsekuensi distribusi lintas waktu. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 22 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam kerangka ekonomi politik, Keadilan antargenerasi terpenuhi apabila generasi penerus menerima aset, kapasitas, dan lingkungan yang sepadan atau lebih besar daripada kewajiban yang

diwariskan. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 22 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dari perspektif etika fiskal, Indonesia masih memiliki ruang untuk menggunakan utang secara strategis, tetapi ruang tersebut harus dijaga melalui penerimaan yang kuat dan belanja berkualitas. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 22 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pada tataran implementasi, Keputusan fiskal harus bergerak dari sekadar memenuhi batas legal menuju pertanggungjawaban etis atas hak generasi yang belum hadir. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 22 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang

terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Ukuran keberhasilan bukan hanya apakah utang dapat dibayar, tetapi apakah pembiayaan tersebut memperluas kebebasan dan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang. Persoalan ini tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator, misalnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Penilaian yang lebih memadai perlu melihat tujuan pembiayaan, struktur jatuh tempo, biaya bunga, risiko nilai tukar, kualitas institusi, serta manfaat sosial-ekonomi yang diwariskan. Utang yang membiayai aset produktif, kesehatan, pendidikan, riset, konektivitas, dan ketahanan iklim berpotensi memperbesar kapasitas generasi mendatang untuk membayar kewajiban tersebut. Sebaliknya, utang yang terserap untuk belanja berulang dengan manfaat singkat dapat memindahkan beban tanpa menciptakan kemampuan pembayaran yang setara. Karena itu, isu dalam bagian 22 menuntut keterhubungan antara keputusan anggaran hari ini dan konsekuensi distribusional pada masa depan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, kapan manfaat muncul, dan bagaimana kewajiban dilunasi. Transparansi semacam ini penting agar utang tidak diperlakukan sebagai sumber dana yang terlepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai kontrak sosial lintas waktu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa penutup harus ditempatkan dalam satu neraca lintas generasi. Neraca tersebut tidak hanya memuat kewajiban finansial, tetapi juga aset fisik, kualitas manusia, kekuatan institusi, tingkat kepercayaan, serta keadaan lingkungan. Kebijakan yang tampak murah pada tahun berjalan dapat menjadi mahal apabila menimbulkan biaya pemeliharaan, kerusakan ekologis, atau kewajiban kontinjensi. Sebaliknya, belanja yang tampak besar dapat menjadi hemat dalam horizon panjang apabila mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan.

Matriks Penilaian Pembiayaan Berbasis Keadilan Antargenerasi

Dimensi	Pertanyaan Utama	Indikator	Implikasi Kebijakan
Manfaat lintas waktu	Apakah manfaat bertahan setelah utang jatuh tempo?	Umur aset, hasil pendidikan, produktivitas	Selaraskan tenor dengan umur manfaat
Kemampuan membayar	Apakah pembiayaan memperbesar basis penerimaan?	Pertumbuhan penerimaan, produktivitas, ekspor	Utamakan proyek dengan dampak ekonomi terukur
Distribusi	Siapa menerima manfaat dan menanggung biaya?	Kelompok pendapatan, wilayah, gender, umur	Gunakan analisis dampak distribusional
Risiko	Apa yang terjadi bila kurs, bunga, atau	Stress test, jatuh tempo, mata uang	Batasi konsentrasi dan lindungi risiko

	pertumbuhan berubah?		
Ekologi	Apakah proyek mengurangi atau menambah utang ekologis?	Emisi, biodiversitas, ketahanan iklim	Terapkan penilaian lingkungan siklus hidup
Tata kelola	Dapatkah publik menelusuri penggunaan dana?	Audit, keterbukaan kontrak, evaluasi hasil	Bangun pelaporan dari utang ke aset dan outcome

Glossarium

Analisis keberlanjutan utang: Penilaian atas kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban berdasarkan proyeksi pertumbuhan, suku bunga, keseimbangan primer, nilai tukar, dan skenario risiko.

Belanja produktif: Belanja yang meningkatkan kapasitas produksi, kualitas manusia, ketahanan, atau kemampuan penerimaan pada masa depan.

Defisit anggaran: Selisih ketika belanja pemerintah lebih besar daripada pendapatan dalam suatu periode.

Durasi: Ukuran sensitivitas harga surat utang terhadap perubahan tingkat bunga.

Golden rule fiskal: Prinsip bahwa pinjaman terutama digunakan untuk investasi yang manfaatnya dinikmati lintas generasi, bukan konsumsi rutin.

Green bond: Surat utang yang hasil penerbitannya dialokasikan bagi proyek yang memenuhi kriteria lingkungan tertentu.

Keadilan antargenerasi: Prinsip pembagian manfaat, biaya, kesempatan, dan risiko secara adil di antara generasi yang hidup pada waktu berbeda.

Keseimbangan primer: Pendapatan dikurangi belanja selain pembayaran bunga utang.

Kewajiban kontinjensi: Kewajiban potensial yang menjadi beban pemerintah apabila peristiwa tertentu terjadi, misalnya jaminan gagal bayar.

Maturitas: Jangka waktu sampai pokok utang harus dilunasi.

Pembiayaan kembali: Penerbitan utang baru untuk membayar utang yang jatuh tempo.

Rasio pajak: Perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB.

Rasio utang terhadap PDB: Perbandingan stok utang pemerintah dengan nilai produksi ekonomi tahunan.

Risiko fiskal: Kemungkinan terjadinya deviasi besar dari proyeksi APBN akibat faktor ekonomi, kebijakan, bencana, atau kewajiban tersembunyi.

Ruang fiskal: Kemampuan pemerintah menambah atau mengubah belanja tanpa membahayakan keberlanjutan fiskal.

SBN: Surat Berharga Negara yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai APBN dan mengelola portofolio utang.

Utang ekologis: Kerusakan atau penurunan kapasitas lingkungan yang diwariskan dan menimbulkan biaya bagi generasi berikutnya.

Utang luar negeri: Kewajiban kepada bukan penduduk yang harus dibayar dalam mata uang atau sesuai perjanjian tertentu.

Utang publik: Kewajiban sektor pemerintah dan, dalam definisi tertentu, entitas publik lainnya.

Yield: Tingkat imbal hasil yang diminta investor atas surat utang.

Daftar Pustaka

- Alesina, A., & Passalacqua, A. (2016). The political economy of government debt. In J. B. Taylor & H. Uhlig (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2, pp. 2599–2651). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesmac.2016.03.014>
- Arrow, K. J., Cline, W. R., Mäler, K.-G., Munasinghe, M., Squitieri, R., & Stiglitz, J. E. (1996). Intertemporal equity, discounting, and economic efficiency. In J. P. Bruce, H. Lee, & E. F. Haites (Eds.), *Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change*. Cambridge University Press.
- Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095–1117. <https://doi.org/10.1086/260266>
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963. <https://doi.org/10.1162/003355398555793>
- Buchanan, J. M. (1958). *Public Principles of Public Debt*. Richard D. Irwin.
- Diamond, P. A. (1965). National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5), 1126–1150.
- Eisner, R., & Pieper, P. J. (1984). A new view of the federal debt and budget deficits. *American Economic Review*, 74(1), 11–29.
- Fournier, J.-M., & Fall, F. (2017). Limits to government debt sustainability in OECD countries. *Economic Modelling*, 66, 30–41. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.05.013>
- Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *Economic Journal*, 123(566), F4–F30. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12010>
- Greiner, A. (2012). Sustainable public debt and economic growth under wage rigidity. *Metroeconomica*, 63(2), 272–292. <https://doi.org/10.1111/j.1467-999X.2011.04130.x>
- International Monetary Fund. (2023). *Staff Guidance Note on the Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework for Market Access Countries*. IMF.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN KiTa Juli 2026: Kinerja APBN Semester I 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kotlikoff, L. J. (1992). *Generational Accounting: Knowing Who Pays, and When, for What We Spend*. Free Press.
- Musgrave, R. A. (1988). Public debt and intergeneration equity. In K. J. Arrow & M. J. Boskin (Eds.), *The Economics of Public Debt*. Macmillan.
- Ostry, J. D., Ghosh, A. R., & Espinoza, R. (2015). When should public debt be reduced? IMF Staff Discussion Note, 15/10. <https://doi.org/10.5089/9781498378925.006>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- Reinhart, C. M., Reinhart, V. R., & Rogoff, K. S. (2012). Public debt overhangs: Advanced-economy episodes since 1800. *Journal of Economic Perspectives*, 26(3), 69–86.
<https://doi.org/10.1257/jep.26.3.69>
- Samuelson, P. A. (1958). An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6), 467–482.
<https://doi.org/10.1086/258100>
- Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434>
- World Bank. (2022). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*. World Bank.
- Bank Indonesia. (2026). *Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2026 Tetap Terjaga*. Bank Indonesia.
- United Nations. (2013). *Intergenerational solidarity and the needs of future generations*. United Nations Secretary-General Report A/68/322.

— *Selesai* —